



SANKSI ADAT PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA PAKRAMAN TENGANAN PEGRINGSINGAN, DESA TENGANAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Pande Putu Toya Wisuda¹, Ni Nyoman Puteri², Ulio³
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa

Abstract

The Traditional Village of Tenganan Pegringsingan is a Bali Aga village whose conditions will be unique to its customs and culture. This can be seen in terms of building architecture, dress code, religious rituals and customary rules that are owned. Related to customary rules, Tenganan Pegringsingan village has had a rule that prohibits its citizens from conducting polygamy marriages. If there are societies who violate or engage in polygamy marriages, then they will be worn to customary law.

The method used in this study is a descriptive qualitative method. In This research, data can be presented in the form of narrative text, words, expressions, opinions, ideas collected by researchers from several sources in accordance with data collection techniques.

For the sanctions imposed on its citizens by the reason of: Maintaining Tradition, Maintaining Equality, and Maintaining Balance. The form of sanctions in the polygamy marriage namely; Sanctions Their Rights as Villagers Revoked, and Moral Sanctions. And the implication is Losing Rights as Villagers, and Not Getting Welfare.

Keywords

adat sanctions, polygamy marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu tindakan individu dalam masyarakat yang bermakna terjadinya peralihan dari tingkat hidup dewasa ke tingkat hidup berkeluarga. Tindakan tersebut merupakan salah satu dari sejumlah

peristiwa yang dilalui dalam siklus kehidupan. Jaman (1998 : 42) mengatakan bahwa dalam siklus kehidupan masyarakat Hindu di Bali diyakini adanya empat fase kehidupan yang akan dilalui yang disebut *catur*

¹ toyawisuda@uhnsugriwa.ac.id

² nyomanputeri10@gmail.com

³ ulio.sm@uhnsugriwa.ac.id

asrama. Keempat fase perkembangan manusia tersebut, yaitu *brahmacari*, *grehasta*, *wanaprasta*, dan *bhiksuka* (*sanyasin*). *Brahmacari* adalah fase kehidupan manusia yang mengedepankan usaha pembelajaran diri. *Gerhasta* adalah fase kehidupan manusia untuk berumah tangga. *Wanaprasta* merupakan fase yang mengutamakan aktivitas spiritual religius. *Bhiksuka* (*sanyasin*) adalah tahap perkembangan kehidupan manusia untuk melakukan pengabdian secara utuh kepada Hyang Widhi dan secara optimal melepaskan diri dari ikatan benda duniawi. Dari keempat fase tersebut, perkawinan termasuk dalam tahap perkembangan kehidupan manusia yang kedua (*grehasta*).

Dalam perkawinan terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan juga akan membawa akibat perubahan status sosial bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Perkawinan disebut mulia karena perkawinan akan membuahkan keturunan dalam menghindari manusia dari kepunahan. Setiap perkawinan selalu dilangsungkan dengan upacara-upacara agama, bahkan sangat menentukan sahnya perkawinan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang

menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri (Cahyono, 2002 : 12- 13).

UU Nomor 1, Tahun 1974 memuat larangan mengenai perkawinan. Larangan tersebut tampak pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Dalam pasal 8 dinyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang dilarang adalah sebagai berikut.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu orang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Soekanto, 1980 : 39-40)

Pasal 9 menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dengan orang lain, kecuali pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (pasal 9 jo pasal 3 (2) dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di

daerah tempat tinggal (pasal 4 UU No1 1974). Pasal 10 menyatakan apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum tiap-tiap agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10 UU No1 1974) (Rusli dan Tomo, 1984 : 49-50).

Di samping itu Undang-Undang Perkawinan UU No1 1974 juga memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk berpoligami. Akan tetapi suami harus meminta ijin ke pengadilan. Permintaan ijin tersebut harus memenuhi alasan-alasan seperti termuat pada pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika salah satu dari alasan tersebut dapat dipenuhi, permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang dapat dipenuhi (Saleh, 1976 : 54).

Persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan permohonan ijin berpoligami ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah (1) harus ada persetujuan dari istri, (2) harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak-anak mereka, dan (3) harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Anshari, 2010 : 89-90) Dengan demikian, ketentuan perkawinan nasional mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang.

Berbeda dengan perkawinan di *Desa Pakraman* Tenganan Pegrisingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, bahwa walaupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberi kemungkinan seorang suami memiliki beberapa istri, tetapi adat di *desa pakraman* ini melarang berpoligami. Konteks yang mengedepan adalah pelanggaran atas larangan berpoligami akibatnya kedua mempelai dikenai sanksi adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa selama hidupnya baru sekali diketahui warganya melakukan pelanggaran terhadap larangan berpoligami.

Fenomena sanksi adat terhadap berpoligami di *Desa Pakraman* Tenganan Pegrisingan sebagai entitas budaya lokal, menarik untuk digali dan diungkapkan. Pengungkapan diperlukan untuk memahami secara mendalam alasan-alasan yang mendorong, bentuk dan implikasi sanksi adat pada perkawinan poligami di *Desa Pakraman* Tenganan Pegrisingan.

METODE

Berdasarkan kasus diatas maka penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini datanya disajikan dalam bentuk teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data. Analisisnya mengarah pada pemaparan yang lebih konkret tentang penerapan sanksi adat perkawinan poligami di Desa Pakraman Tenganan Pegrisingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Secara keseluruhan penelitian ini meliputi empat tahapan kerja, yaitu (1)

tahap pengumpulan data, (2) tahap pengolahan data, (3) tahap sintesis, (4) tahap penulisan hasil penelitian. Pada tahap pengumpulan data dilakukan penjajagan, observasi non partisipasi, dan wawancara dengan *kliang desa* Tenganan Pegringsingan untuk menanyakan alasan-alasan yang melandasi, bentuk, dan implikasi sanksi adat terhadap perkawinan poligami. Berdasarkan penjelasan dari *kliang desa* ditentukan fokus penelitian tentang sanksi adat terhadap perkawinan poligami tersebut. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat Tenganan Pegringsingan.

Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara direduksi, dipilah-pilah atau diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Dari hasil wawancara dan dan observasi merupakan emik yang selanjutnya disintesis dengan etik dan teori. Selanjutnya dilakukan penulisan laporan akhir penelitian terhadap penelitian lapangan setelah disintesis dengan konsep dan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*

Letak geografis

Desa Tenganan merupakan salah satu desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Secara geografis desa ini berada pada posisi 8° 14' 30" - 8° 14' 07" Lintang Selatan, 114° 54' 52" - 115° 12' 57" Bujur Timur. Wilayah desa ini cukup strategis karena tidak

hanya memiliki lahan pertanian yang cukup luas, tetapi juga memiliki obyek-obyek pariwisata.

Desa Tenganan berada 3 km dari laut/pantai Candidasa dengan suhu 20° C- 30° C, dan terletak pada ketinggian 70 m dari permukaan laut. Disamping itu desa ini jaraknya ± 18 km dari kota amlapura dan ± 68 km dari kota Denpasar. Desa Tenganan memiliki batas-batasnya, yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Desa Asak, dan timbrah, di sebelah barat berbatasan desa desa Ngis, di sebelah utara berbatasan dengan desa Desa Bebandem dan Macang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa pesedahan, dan Bugbug.

Secara administratif Desa tenganan terdiri atas 5 *banjar* dinas/dusun, yaitu (1) *Banjar Dinas/Dusun Tenganan Pegringsingan*, (2) *Banjar Dinas/Dusun Tenganan Dauh Tukad*, (3) *Banjar Dinas/Dusun Gumung*, (4) *Banjar Dinas/Dusun Bukit Kangin*, dan (5) *Banjar Dinas/Dusun Bukit Kauh*. Berkaitan dengan wilayah dan tanah khususnya *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, desa pakraman ini luasnya 917, 200 ha, penggunaannya terdiri atas : (1) tegalan seluas 583,035 ha (66,41%), (2) sawah seluas 255,845 ha (25,73%), (3) pemukiman seluas 78,304 ha (7,86%), dan (4) hutan seluas 197,321 ha (20%). Luas wilayah Desa Tenganan dapat dilihat dalam gambar peta berikut.



Peta Desa Tenganan Pegringsingan

Sumber : Profil Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Tahun 2013

Sebaliknya, Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga *banjar*, yaitu (1) *Banjar Adat Kauh*, (2) *Banjar Adat Tengah*, dan (3) *Banjar Adat Pande*. Walaupun terdiri atas tiga *banjar* adat, tetapi hanya krama yang tinggal di dua *banjar* (*Banjar Adat Kauh* dan *Banjar Adat Tengah*) yang dianggap penduduk asli, sedangkan *Banjar Pande* tidak dianggap asli karena warga *banjar* ini telah melakukan perkawinan eksogami beda adat.

Struktur Sosial Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan

Timur (wawancara, 30 Agustus 2018) menjelaskan bahwa struktur sosial di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan hanya dapat dilakukan melalui perkawinan endogami antar *krama* desa adatnya sendiri. Mereka yang melakukan endogami sesama warga masyarakatnya sendiri dalam struktur sosial di *desa pakraman* ini tergolong *krama desa*. Hal ini telah diatur dan dituangkan dalam aturan adat berupa *awig-awig* desa. Dalam *awig-awig* juga dimuat bahwa *krama* yang telah kawin harus keluar dari tempat tinggal orang tuanya. Setelah

perkawinan dilaksanakan, mereka hanya diberikan toleransi oleh masyarakatnya maksimal selama 3 bulan. Walaupun demikian, tetapi kewajiban di desa adatnya sudah mulai dibebankan kepadanya seperti *krama desa* yang lainnya.

Timur juga mengatakan (wawancara, 30 Agustus 2018) di dalam keanggotaan *krama* desa, dan kedudukan dalam struktur *prajuru* desa mengikuti sistem *Ulu Apad* atau senioritas. Senioritas di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan didasarkan atas usia perkawinan mereka. Bagi warganya yang baru kawin, tahapan pertama mereka akan masuk sebagai anggota *Pengeluduan*. Sesuai dengan usia perkawinan, mereka setelah menjadi anggota *Pengeluduan* berubah menjadi *Tambalapu Roras*, *Bahan Roras* (*Bahan Tebenan-Bahan Duluhan* (*Keliang Desa*)), dan terakhir *Luanan*. Dalam struktur sosial di *desa pakraman* ini dimungkinkan suatu keluarga ada yang tidak sampai pada urutan *Luanan*. Aturan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan bahwa setelah anaknya kawin, orang tuanya tidak lagi sebagai *krama desa*, sedangkan yang berhak

menjadi *Luanan* hanya *krama desa*. Sebaliknya, orang tuanya nanti akan menjadi *krama Gumi Pulangan* dan diberhentikan dari *Prajuru Desa*.

Prajuru Desa aturannya hanya boleh berasal dari keluarga yang masih utuh (suami-istri). *Krama desa* salah satunya di antaranya meninggal, mereka yang telah duda atau janda otomatis diberhentikan dari *Prajuru Desa*. Mereka langsung akan menjadi *krama Gumi*. Struktur sosial di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan* terdiri atas: (1) *Krama Desa*, (2) *Krama Gumi Pulangan*, dan (3) *Krama Gumi*. Selanjutnya, jika *krama Gumi Pulangan* yang duda atau janda kawin lagi dengan *daha* (pemudi) asal *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, dia diterima kembali menjadi *krama desa*, dengan nomor urut baru atau keanggotaannya terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi jika dia mengawini janda atau orang dari luar *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, dia dibuang/diusir dari desa. Dia tidak boleh lagi tinggal dan memperoleh pembagian nafkah dari desa. Dia akan dipindahkan dari desanya ke *Banjar Pande*. Akan tetapi seorang duda atau janda yang tidak kawin lagi, tetapi masih tetap tinggal di wilayah *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, mereka masih berhak menerima *Tika* (pembagian nafkah dari desa) (Surata, wawancara 27 Agustus 2018).

Walaupun perkawinan eksogami dilarang antar *krama* berbeda adat, tetapi ada perlakuan khusus jika warga masyarakatnya yang *truna* (pemuda) atau *daha* (pemudi) yang melakukan perkawinan tersebut dengan keluarga *triwangsa*. Perlakuan yang dimaksud adalah mereka diberi hak untuk tinggal di wilayah desa adat/*pakraman* hanya saja statusnya berubah dari *krama desa*

menjadi *krama Gumi Pulangan*. Anak yang lahir dari perkawinan ini nantinya bisa menjadi anggota *Truna* atau *daha*. Jika anak ini nanti kawin dengan *daha* yang berasal dari *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, dia akan bisa menjadi *krama desa*.

Sesuai dengan struktur pelapisan sosial di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, *krama desa* tidak hanya memiliki kewajiban *ngayah* ke desa, juga berhak atas *Tika* (pemberian nafkah dari desa). Timur (wawancara 7 September 2018) menyatakan bahwa ada pembagian dari desa yang diberikan bulanan dan insidental misalnya saat perayaan *Usabha Sambah* pada *sasih Kalima* pembagiannya sebagai berikut.

(1) *Luanan*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan, sedangkan pada saat *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 300 kg, dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) *Bahan Roras* (*Bahan Duluang/Keliang Desa* dan *Bahan Tebenan*) masing-masing mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 250 kg, serta uang Rp. 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) *Tambalapu Roras*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan saat *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 250 kg, dan uang Rp 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(4) *Pengeluduan*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika *Usabha Sambah* mendapat beras 300 kg dan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Krama Gumi Pulangan tidak mendapat seperti pembagian tersebut di atas. Mereka hanya mendapat bagian beras 25 kg/bulan atau sesuai dengan kebijakan desa. Sebaliknya, *krama Gumi*

sama sekali tidak mendapatkan pembagian yang bersumber dari kekayaan desa, dia hanya menikmati harta warisan dan hasil usahanya sendiri.

Alasan-Alasan Yang Mendorong Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Poligami Permertahanan Tradisi

Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali terorganisasi dalam organisasi sosial yang disebut dengan desa adat atau *desa pakraman*. Desa adat pada zaman Bali kuno disebut *banwa* atau *banua* (Goris, 1954 : 59). Covarrubias (1986 : 56) mengemukakan bahwa desa adat adalah merupakan kesatuan wilayah tertutup atau terbatas pada pemujaan leluhur dan peraturan administrasi masyarakat. Ia juga melengkapi unsur-unsur kesatuan *pura* (tempat suci) sebagai pengikat sebuah desa, yaitu *Khayangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem). Sebaliknya, Suputra mengemukakan bahwa desa adat mencakup dua hal, yaitu desa adat sebagai wadah, dan adat istiadat sebagai isi dari wadah. Desa adat sebagai lembaga tradisional mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali, sedangkan adat istiadat adalah tatakrama kehidupan masyarakat umat Hindu di Bali yang telah menjadi tradisi kemasyarakatan sebagai warisan budaya bangsa. Wiratmadja menyatakan bahwa adat istiadat di Bali dilandasi oleh *catur dresta*, yaitu *sastra dresta*, *loka dresta*, *purwa dresta*, dan *desa dresta*. *Sastra dresta* adalah aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat dalam pustaka-pustaka suci, baik berupa Veda maupun lontar-lontar suci. *Loka dresta* adalah aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hidup berdasarkan hasil

pesamuan/sangkepan (rapat). *Purwa dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber historis-tradisional yang masih dipandang baik, sedangkan *desa dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas kondisi suatu lingkungan wilayah (territorial). *Catur dresta* ini memunculkan berbagai variasi dalam kehidupan desa adat di Bali yang diungkapkan dengan istilah *dresta mawacara* (masing-masing desa mempunyai tata cara sendiri) (Wisnumurti, 2010 :175-176).

Sanksi adat terhadap perkawinan poligami di *Desa Pakraman* Tenganan Pegringsingan tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya di Bali. Sanksi adat pada perkawinan poligami berlaku untuk semua warganya. Mempelai laki-laki masih diperkenankan untuk tinggal di *Desa Pakraman* Tenganan Pegringsingan, tetapi hakn-haknya hanya sebagai *krama gumi pulangan*. Sanksi adat terhadap perkawinan poligami dimaksudkan untuk melestarikan tradisi perkawinan monogami. Di samping itu sanksi adat pada perkawinan poligami sebagai praktik budaya lokal untuk meminimalisir warganya melakukan perkawinan tersebut. Dengan larangan ini, keaslian unsur-unsur budaya lokal di *Desa Pakraman* Tenganan Pegringsingan terutama mengenai perkawinan monogami antar *krama* adatnya sendiri tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Masyarakat *Desa Pakraman* Tenganan Pegringsingan sampai saat ini masih memertahankan dan melestarikan tradisi leluhurnya. Mereka memiliki sebuah idealisme yang kokoh dalam memproteksi adat dan budaya yang didasari kesadaran bersama segenap warga desanya. Di samping itu, mereka merasa sangat berdosa jika tidak mampu

memertahankan dan memberi perlindungan terhadap nilai-nilai budaya adi luhung dan mulia dari leluhurnya. Walaupun telah terjadi kemajuan IPTEK, tetapi warga *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan* tidak serta merta mengubah tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Salah satu di antaranya berupa sanksi adat perkawinan poligami. Dengan sanksi adat terhadap perkawinan poligami, terjadi kesetaraan antara mempelai laki-laki dan perempuan (Yudiana, wawancara 16 Juni 2018).

Menjaga Kesetaraan

Penerapan sanksi adat pada perkawinan poligami desa adat di Tenganan Pegringsingan menunjukkan kesetaraan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Salah satu cara dalam menjaga kesetaraan yakni dilarang untuk berpoligami. Pelanggaran atas larangan berpoligami dikenai sanksi adat.

Penjatuhan sanksi adat ini pada perkawinan poligami dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap mempelai perempuan. Tanpa sanksi, mempelai laki-laki bisa saja sering melakukan perkawinan walaupun telah dikaruniai keturunan. Peraturan produk pemerintah dalam perkawinan memungkinkan dapat mengarahkan pandangan individu dalam masyarakat agar semakin terbuka akan adanya persamaan hak setiap individu dalam masyarakat (Budiana, 2004 : 130-132).

Sanksi adat pada perkawinan poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan jika dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, salah satu di antaranya agar setiap orang tidak mendapat perlakuan

diskriminatif. Pernyataan ini dimuat pada pasal 3 ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh si apapun (Anonim, 2016 : 4-5).

Penjatuhan sanksi adat pada perkawinan poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan kesetaraan dalam perkawinan. Masyarakat desa adat ini masih menjaga dan mempertahankan kesetaraan dalam perkawinan dengan cara menerapkan sanksi adat dalam perkawinan poligami. Adanya sanksi adat dalam perkawinan poligami, warga masyarakat sangat mengapresiasi kesetaraan dalam perkawinan. Mempelai perempuan mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Di samping itu mempelai perempuan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat dari mempelai laki-laki.

Menjaga Keseimbangan

Masyarakat Hindu di Bali telah diwariskan adanya pandangan hidup berdasarkan konsep dualistis (*rwa bhineda*) yakni pengakuan adanya dua katagori yang abadi, dan berlawanan yang mewarnai kehidupan seperti baik dan buruk, sakral dan profan, hulu dan hilir, kaya dan miskin, stabil dan labil dan sebagainya. Mengingat adanya *rwa*

bhineda, perbedaan tersebut harus dijaga keseimbangannya.

Walaupun sebagai ciptaan Tuhan yang termulia diantara makhluk-makhluk yang lainnya, tetapi manusia tidak bisa terlepas dari pengaruh *rwa bhineda*. Manusia dalam hidupnya harus berusaha dan berjuang menimalisir pengaruh-pengaruh yang negatif baik terhadap makrokosmos dan mikrokosmos. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian bagi masyarakat Hindu di Tenganan Pegringsingan, salah satu di antaranya mentaati *awig-awig* desanya dengan tidak melakukan perkawinan poligami. Pelanggaran atas larangan perkawinan poligami ini, mereka akan dikenai sanksi adat. Çantika (2010 : 94-95) menyatakan bahwa sanksi adat mempunyai fungsi, yaitu untuk memulihkan kesucian desa (*pamidanda ngewaliang kesudemalaan desa*) yang termenologinya analog maknanya dengan memulihkan ketertiban kosmos yang terganggu. Secara esensial tujuan *pamidanda* adalah untuk memulihkan keadaan *trepti miwah sukerta* (tertib dan tentram) yakni adanya kesehimbangan *satyam* (kebenaran), *siwam* (kesusilaan), dan *sundaram* (kebahagiaan) yang terejawantah ke dalam filosofi *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan). Dengan demikian, landasan filosofi *pamidanda* adalah *Tri Hita Karana* itu sendiri, sedangkan tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya gangguan, yaitu mengembalikan kesucian, ketertiban, dan ketentraman.

Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat karena ketertiban masyarakat dalam pandangan adat ada dalam alam

semesta. Segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya ditempatkan pada ketertiban kosmis. Dengan demikian, setiap orang harus tidak melakukan perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis (Soekanto dan Purbacaraka, 1979 :80).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan gangguan pada ketertiban masyarakat, dan keseimbangan kosmis dianggap sebagai delik adat. Sebaliknya, pelaku yang melakukan delik adat dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk sanksi dari reaksi adat.

Masyarakat Bali yang terwadahi dalam organisasi tradisional *desa pakraman* hampir sebagian besar memiliki *awig-awig*. *Awig-awig* memuat berbagai hal salah satu di antaranya memuat sanksi adat. Sanksi adat pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seseorang atau warga mentaati norma-norma yang berlaku. Tugas sanksi menurut S.R Sianturi (1986 : 30) adalah (1) sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan. (2) agar norma hukum ditaati, dan (3) merupakan akibat hukum bagi seorang yang melanggar norma hukum.

Desa Pakraman di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki berbagai jenis hukum adat. Jika dikualifikasikan, sanksi adat dalam hukum adat di Bali menurut Tim (2010 : 77) digolongkan menjadi tiga yang dikenal dengan sebutan *tri danda*, yaitu *arta danda*, *jiwa danda*, dan *sangaskara danda*.

Arta danda adalah golongan sanksi berupa pembayaran uang atau penggantian barang (*arta* benda atau benda-benda materiil) seperti denda berupa uang atau barang, penahanan

ternak, pengambil alihan tempat kediamannya, pengambilan secara paksa atau perampasan hartanya, menjamu semua seluruh anggota *banjar* atau *desa pakraman*. *Sangaskara danda*, yaitu saksi berupa pelaksanaan upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan magis dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu seperti kewajiban melaksanakan upacara *mecaru*, *pemarisuda*, *prayascita* dan sebagainya. Sebaliknya, *jiwa danda* adalah sanksi berupa penderitaan jasmani atau rohani misalnya seperti dibunuh, dipotong tangannya, di tenggelamkan ke laut, wajib kerja sebagai pengganti kesalahan, di berhentikan sebagai warga desa, di arak keliling desa dan sebagainya.

Dalam konteks keseimbangan, pelanggaran atas larangan perkawinan poligami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan maka kedua mempelai dikenai sanksi adat. Sanksinya adalah mempelai laki-laki statusnya diturunkan dari krama desa menjadi *krama bumi pulangan*. Sebaliknya, mempelai perempuan tidak memiliki hak di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan seperti hak untuk ngayah. jika ada aktivitas masyarakat. Hak hanya dimiliki oleh istri yang pertama. Dengan sanksi adat ini, keseimbangan masyarakat dapat dikembalikan.

Bentuk Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Poligami

Sanksi Hak-Haknya sebagai *Krama Desa* Dicabut

Van Vollenhoven merumuskan hukum adat sebagai peraturan-peraturan adat istiadat yang ada sanksinya dan mengandung paksaan. Selanjutnya Soepomo, ter Haar, Lesquiller mengatakan bahwa sanksi

adat merupakan bentuk tindakan atau usaha-usaha untuk mengembalikan keseimbangan termasuk keseimbangan magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Artinya, upaya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan orang seluruhnya dan orang perseorangan, serta antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut, petugas adat wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali perimbangan adat (Dharmayuda, 2001 : 36-37).

Surpha (2002 : 51) mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap adat oleh warga desanya akan dikenakan sanksi oleh *bendesa* adat atau *kelihan* desa. Sanksi adat tidak hanya berwujud denda, tetapi juga ada bersifat psikologis seperti disisihkan dalam masyarakat, tidak diajak berbicara, tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat dan sebagainya.

(Timur, wawancara 11 Agustus 2018) Pelanggaran atas larangan adat perkawinan poligami berdampak bahwa semua hak-haknya sebagai *krama desa* dicabut. Pencabutan atas hak-haknya sebagai krama desa berarti mereka tidak bisa lagi memiliki hak istimewa di desanya.

Terkait dengan keterikatan adat bahwa warga masyarakat *Desa Pakraman* Tenganan Pegringsingan dilarang melakukan perkawinan poligami. Dengan demikian, warganya sangat takut melanggar larangan perkawinan poligami karena akan dikenai sanksi adat walaupun dilakukan secara endogamy desa.

Sanksi Moral

Sanksi adat yang dijatuhkan atas pelanggaran larangan perkawinan Poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak hanya berupa sanksi denda, tetapi juga sanksi moral. Sanksi moral adalah sanksi batin berupa rasa malu atau rasa bersalah (berdosa) (All-Barry, 2001: 292). Covarrubias (2013 :69) mengemukakan bahwa Di Bali sanksi moral membawa beban jauh lebih besar dibandingkan dengan hukuman badan, kesalahan-kesalahan ringan mengakibatkan denda, dan penyitaan harta benda, atau penundaan sementara dari masyarakat. Akan tetapi hukuman bagi kesalahan-kesalahan besar bervariasi antara boikot yang menakutkan dari semua kegiatan desa sampai pengucilan tetap, pengusiran sepenuhnya dari desa. Seorang yang disingkirkan dari desanya tidak diijinkan masuk ke munitas lain. Dia benar-benar menjadi kasta terbuang sebagai sebuah hukuman yang jauh lebih berat dari kematian fisik bagi pikiran orang Bali karena seseorang secara terbuka dipermalukan, membunuh dirinya sendiri.

Pelanggaran atas larangan perkawinan poligami di Tenganan Pegringsingan akibatnya tidak hanya dirasakan oleh mempelai, tetapi juga orang tuanya sendiri. Sanksi adat ini diputuskan melalui *sangkepan* (rapat) desa adat yang dihadiri oleh seluruh *krama* desa adat. Penjatuhan sanksi juga diputuskan secara terbuka dalam forum *sangkepan* desa adat. Di dalam sistem pengambilan keputusan tersebut menimbulkan rasa malu dan rasa berdosa dari pihak keluarga mempelai karena mempelai berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di

masyarakatnya terutama berkaitan dengan pelanggaran aturan perkawinan poligami. Dengan penjatuhan sanksi, mempelai sama sekali tidak memiliki hak istimewa lagi di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Implikasi Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Poligami

Implikasi Kehilangan Hak Sebagai *Krama Desa*

Kedudukan sistem keanggotaan *krama* di *Desa Pakraman* Tenganan pegringsingan pada prinsipnya didasarkan atas sistem seseorang yang telah berkeluarga dan bertempat tinggal di wilayah desa adat itu. Bagi warga desanya melakukan perkawinan endogami, setelah perkawinan dilaksanakan langsung menjadi *krama* desa. Di samping itu perkawinan endogami juga menentukan kedudukan seseorang dalam struktur keanggotaan sebagai *krama* di *Desa Pakraman* Tenganan pegringsingan.

Kemampuan seseorang untuk menjadi anggota *desa pakraman* sangat tergantung dari ketaatan dalam tingkat penyesuaian diri terhadap norma dan aturan dalam lingkungan desanya. Bagi warganya yang menempati posisi paling bawah, suatu saat tertentu mereka akan bisa menempati suatu posisi paling atas. Penentuan posisi ini pada prinsipnya didasarkan atas pergeseran dalam struktur anggota desa, dan disertai dengan ritual keagamaan.

Warga masyarakat Tenganan Pegringsingan yang melakukan perkawinan endogami dan monogami, semuanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi hak tersebut dapat diperoleh setelah mereka memperoleh kedudukan di desanya.

Bagi *krama desa* yang berkedudukan paling rendah, mempunyai tugas paling berat dalam setiap kegiatan. Tugas yang dimaksud antara lain mencari perlengkapan upacara keagamaan berupa berbagai jenis tanaman ke hutan Tenganan. Sementara mereka yang mengemban jabatan yang lebih tinggi, tugasnya semakin ringan secara fisik. Walaupun demikian, tetapi mereka dituntut memiliki kemampuan berpikir yang semakin matang (Timur, wawancara 27 Mei 2017)..

Krama Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan merupakan warga besar

yang masih mempunyai suatu hubungan keluarga. hal ini disebabkan oleh masih dianutnya sistem perkawinan secara endogami desa, yaitu suatu keharusan bagi setiap warga desa untuk melakukan perkawinan antar warganya sendiri. Sebaliknya, perkawinan eksogami dilarang. Di samping itu perkawinan poligami juga dilarang. Pelanggaran atas larangan perkawinan tersebut, mempelai dikenai sanksi adat yakni tidak boleh ikut pesamuan atau rapat-rapat dan duduk dalam struktur adat.



Gambar 1

Peneliti dan Informan

Sumber : (Dok : Toya Wisuda, 2018)

Gambar 1 mengilustrasikan peneliti sedang duduk bersama-sama dengan informan di rumahnya. Kehadiran peneliti di rumah informan dianggap sebagai keluarganya sendiri. Hal ini penting dan patut disyukuri karena peneliti dapat mewawancarai informan berbagai hal tentang perkawinan di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan* terutama sanksi adat dalam perkawinan poligami.

Tidak Memperoleh Kesejahteraan

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan sebuah desa kuno di Bali yang masih kental dengan tradisi perkawinan monogami desa. Jika kedua mempelai ingin memperoleh kesejahteraan dari desa adatnya, warganya harus melakukan perkawinan monogami. Tanpa perkawinan ini, praktis kesejahteraan mempelai hilang walaupun perkawinan bernilai sakral dan memiliki tujuan yang mulia, sama-sama dilakukan saling mencintai, dan tidak

melanggar undang-undang perkawinan di Indonesia. Kesejahteraan dalam perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan hanya bisa diperoleh melalui perkawinan monogami sesama warga adatnya sendiri. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” artinya aman santosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan), kesukaran dan sebagainya). Kata “sejahtera” mendapat nasalisasi “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi kesejahteraan artinya keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran (Tim Penyusun, 1993 :794).

Timur sebagai warga Tenganan Pegringsingan menyatakan bahwa perkawinan sangat menentukan mempelai bisa tidaknya memperoleh kesejahteraan dari desanya. Ketentuan mendapatkan kesejahteraan dari desanya jika warganya melakukan perkawinan monogami. Kesejahteraan mempelai tidak hanya berupa beras, tetapi juga uang yang diperoleh dari aset-aset milik desa seperti hasil subak, pendapatan dari pariwisata, hasil sawah, dan hasil kebun. Pembagian kesejahteraan dilakukan secara rutinitas perbulan, dan secara insidental pada saat upacara *Ngusabha Sambah*. Kesejahteraan yang diberikan disesuaikan dengan jabatan pada struktur sosial, yaitu *Luwanan* mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan, sedangkan pada saat *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 300 kg, dan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); *Bahan Roras* (*Bahan Duluhan/Keliang Desa* dan *Bahan Tebenan*) masing-masing mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan beras 250 kg serta uang Rp. 2,500.000,-(dua juta lima ratus ribu

rupiah) pada saat upacara *Ngusabha Sambah*; *Tambalapu Roras*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan saat ritual *Usabha Sambah* mendapat bagian beras 250 kg, dan uang Rp 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); *Pengeluduan*, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan beras 300 kg serta uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika ritual *Ngusabha Sambah*. Dengan ketentuan tersebut, mempelai harus hati-hati melaksanakan perkawinan karena berhak tidaknya mempelai memperoleh kesejahteraan dari desa adatnya tergantung dari jenis perkawinannya yang harus sesuai dengan ketentuan adat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

PENUTUP

Perkawinan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan cenderung diterapkan secara monogami. Sebaliknya, perkawinan poligami merupakan perkawinan yang dilarang. Pelanggaran atas larangan perkawinan poligami dikenai sanksi adat.

Alasan-alasan yang mendorong penerapan sanksi adat pada perkawinan poligami di Tenganan Pegringsingan, yaitu pemertahanan tradisi, menjaga kesetaraan, dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks pemertahanan tradisi, sanksi adat terhadap perkawinan poligami digunakan untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan perkawinan monogami sebagai model perkawinan yang paling ideal. Dalam konteks menjaga kesetaraan, sanksi adat digunakan untuk melindungi persamaan hak antara mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam konteks menjaga keseimbangan dimaksudkan agar pelanggaran atas larangan perkawinan poligami di Desa

Pakraman Tenganan Pegringsingan maka kedua kedua mempelai dikenai sanksi adat. Sanksinya adalah mempelai laki-laki statusnya diturunkan dari krama desa menjadi *krama bumi pulangan*. Sebaliknya, mempelai perempuan tidak memiliki hak di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan seperti hak untuk ngayah . jika ada aktivitas masyarakat. Hak hanya dimiliki oleh istri yang pertama. Dengan sanksi adat ini, keseimbangan masyarakat dapat dikembalikan.

Bentuk sanksi adat pada perkawinan poligami di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan* ada dua, yaitu (1) sanksi kehilangan hak-haknya sebagai *krama* desa dicabut, dan (2) sanksi moral. Bagi warganya yang melakukan perkawinan poligami, haknya sebagai *krama desa* dicabut. Mereka masih diijinkan tetap tinggal di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, tetapi hanya sebagai *krama gumi pulangan*. Sebaliknya, sanksi moral bahwa mereka selama hidupnya merasa bersalah karena telah melanggar larangan berpoligami sehingga hak-haknya sebagai *krama desa* hilang sama sekali. Status mereka setelah berpoligami hanya sebagai *krama* nomor dua. Dengan demikian, secara moral mereka merasa bersalah selama hidupnya.

Implikasi sanksi adat terhadap perkawinan poligami di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*, yaitu kehilangan hak sebagai *krama desa*. Mereka tidak memiliki hak terlibat dalam pesamaan atau rapat-rapat dan duduk dalam struktur di *Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan*. Sebaliknya, tidak memperoleh kesejahteraan adalah mereka tidak lagi memperoleh pembagian hasil dari desanya karena statusnya sebagai *krama gumi pulangan*.

Mereka yang berkedudukan sebagai *krama desa* yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, M. Dahlan Yacub. 2001. Kamus Sosiologi-Antropologi. Surabaya : Indah.
- Anshari, MK, H.M. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. 2016. Undang-Undang HAM 1999. Jakarta : Sinar Grafika
- Barker, Kris. 2005. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Kanisius.
- Basrowi dan Sukidin, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendekian,
- Berger, Peter dan Luckman, Thomas. 1990 *"Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi pengetahuan"*. Jakarta : LP3ES.
- Budiana, I Nyoman. 2004. "Rekonstruksi Perkawinan Eksogami di Tengah Perubahan Sosial di Bali". Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Çantika, I Wayan Koti. 2010, "Tatacara Penerapan Pamidanda", Denpasar: Udayana University Press.
- Cahyono, Indah Dugi. 2002. "Kedudukan *Sentana Nyeburin* dalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Waris Bali" (Tesis). Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Covarrubias, Miguel. 1986. Island of Bali. New York : Knopf
- Pulau Bali: Temuan Yang Menakjubkan, Denpasar, Udayana University Press.
- Dharmayudha, I Made Suasthawa. 2001.

- Peranan Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Kasus Adat. Denpasar : Biro Hukum Setda Propinsi Bali.
- Goris, R. 1954. *Inscripties voor Anak Wungsu dalam Prasasti Bali*. Jakarta : N.V.Masa Baru
- Jaman, I Gede. 1998. *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagatdhita)*. Surabaya : Paramita
- Noris, Christopus. 2008. *Membongkar Teori Jacques Derrida*. Yogyakarta : AR-Ruzz Media Group.
- Piliang, Yasrat Amir. 2004. *Posrealitas : Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Ratna, I Nyoman Kutha. 2007. *Sastra dan Cultural Studies : Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rusli dan R. Tomo, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung : Santika Dharma.
- Saleh, K.Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke Empat. Jakarta : Ghalia Indonesia
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, "Perihal Penelitian Hukum", Alumni, Bandung.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Di Bali*. Denpasar : PT. Offset BP
- Tim Penyusun. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bali-Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Tim Penyusun. 2010. *Wicara Lan Pamidanda*. Denpasar. University Press.
- Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. 2010. "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Kabupaten Badung" Disertasi. Denpasar : Program Pascasarjana Universitas Udayana.